

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
(periode 2018-2020)**

Diajukan Oleh

ARINDA PUSPITA P

4517013047



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa

Nama Mahasiswa : Arinda Puspita p

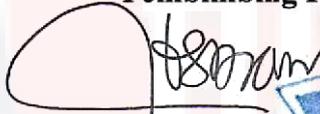
Stambuk/Nim : 4517013047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Firman Manne, SE., M. Si., AK. CA

Pembimbing II



Adil Setiawan, A. Md. Kom., SE. M. Si., AK., CA

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bosowa**



Dr. H.A. Arituddin Mane, SE., M. Si., SH.,

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Dr. Firman Manne, SE., M. Si., AK. CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARINDA PUSPITA P
Nim : 4517013047
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Kinerja Keuangan pada kantor Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Mamasa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Juni 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



Arinda Puspita P

Analysis of Financial Performance Development Planning, Research, and Region Development of Mamasa

By :

ARINDA PUSPITA P

Faculty of Economics and Business Accounting Study Program

Bosowa University

ABSTRACT

Arinda Puspita P .2021. Essay. Analysis of Financial Performance Development Planning, Research and Region Development of Mamasa , supervised by Dr. Firman Manne SE., M.Si.,AK.CA and Adil Setiawan, A. Md. Kom., SE. M. Si, AK., CA. The purpose of the research to analyze the Financial Performance at the Mamasa Regency Bappelitbangda Office for the 2018 to 2020 fiscal year.

The type of research used is descriptive quantitative research. The data was obtained by means of direct interviews with the head of the finance division of Bappelitbangda, documentation of records or documents from the Mamasa district Bapplitbangda office, especially data from 2018-2020.

The results showed that the Financial Performance of Bappelitbangda Mamasa Regency from 2018-2020 seen from the compatibility analysis of Bappelitbangda expenditures showed poor financial performance because the total indirect expenditure was 51% and for direct expenditure was 49%. year experienced a total decrease of 1% overall. From the effectiveness analysis, it can be said to be effective with a total of 99%. While the efficiency analysis can be said to be very efficient with a total of 49%

Keywords : Financial performance, Compatibility, Growth, effectiveness, and efficiency.

**Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa**

Oleh :

ARINDA PUSPITA P

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Arinda Puspita P .2021.Skripsi.Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa dibimbing oleh Dr. Firman Manne SE., M.Si.,AK.CA dan Adil Setiawan, A. Md. Kom., SE. M. Si, AK., CA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun anggaran 2018 sampai Tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan kasubag keuangan Bappelitbangda, dokumentasi mengenai catatan-catatan atau dokumen-dokumen dari kantor Bapplitbangda kabupaten Mamasa khususnya data dari tahun 2018-2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dari tahun 2018-2020 dilihat dari Analisis keserasian belanja Bappelitbangda menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik, karena total keseluruhan belanja tidak langsung sebesar 51% dan untuk belanja langsung sebesar 49%.dari Analisis pertumbuhan belanja selama tiga tahun mengalami penurunan total keseluruhan sebesar 1%. Dari analisis Efektivitas dapat dikatakan efektif dengan total keseluruhan 99%. Sedangkan dari analisis efisiensi dapat dikatakan sangat efisien dengan total keseluruhan sebesar 49%

Kata Kunci : kinerja keuangan, Keserasian Belanja, pertumbuhan belanja, efektivitas,efisiensi

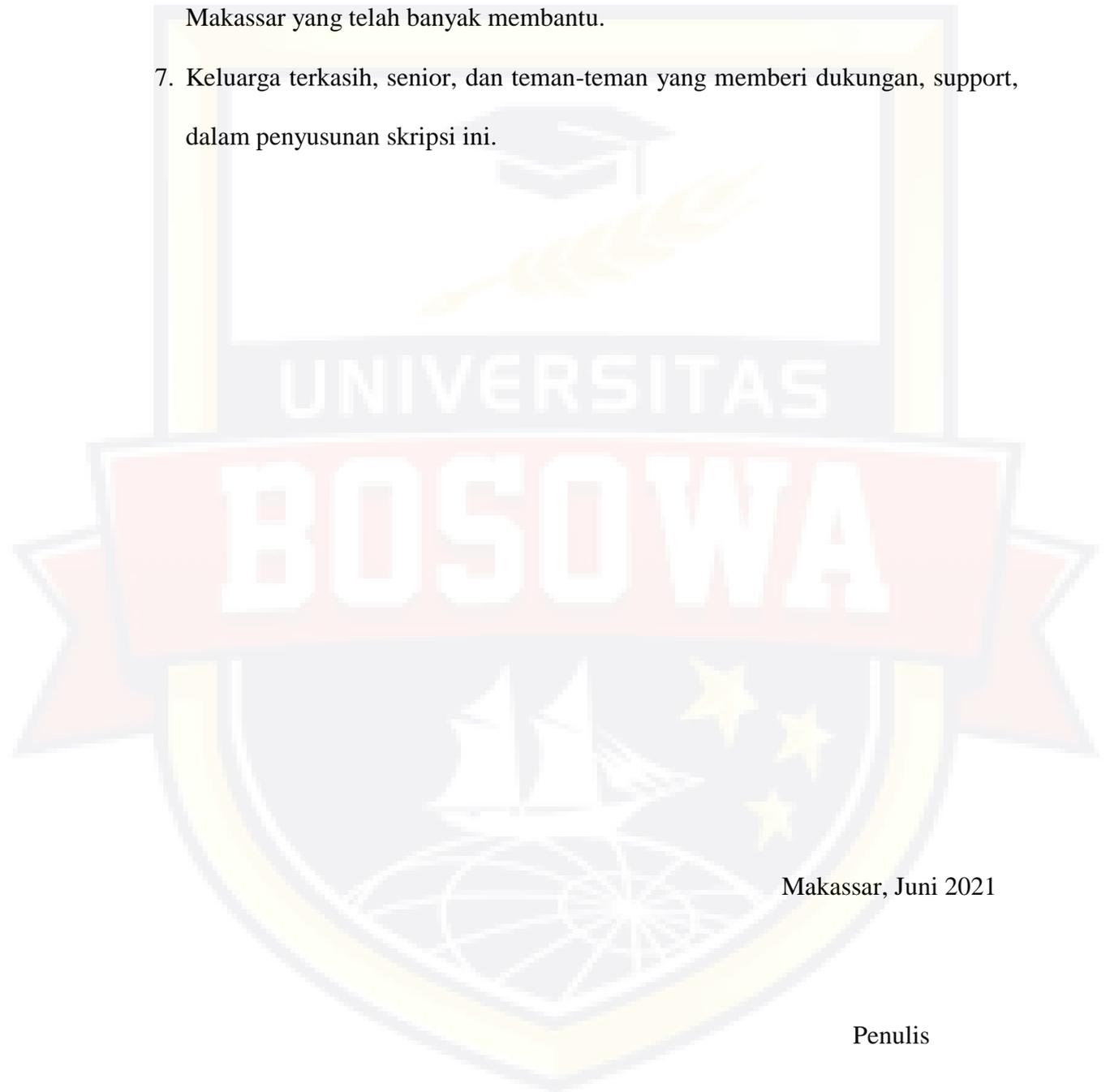
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaan, kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan Skripsi ini mulai dari pengumpulan data sampai pada penyelesaian penulis mendapatkan bantuan pikiran serta bimbingan baik moril maupun material dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
3. Ir. Mambu, MT Selaku kepala Badan Kantor Badan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa
4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Bosowa Ayahanda Dr. Firman Manne, SE.,M.Si.,AK.CA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan ini.
5. Kepada Bapak Adil Setiawan, A,Md.Kom.,SE.M,Si,AK.,CA. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama mengerjakan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen serta seluruh Staf yang selama ini telah mendidik dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan di Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak membantu.
7. Keluarga terkasih, senior, dan teman-teman yang memberi dukungan, support, dalam penyusunan skripsi ini.



Makassar, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Pengertian Analisis	8
2.1.2 Keuangan Daerah	9
2.1.3 Laporan Keuangan Daerah	13
2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah	15
2.1.5 Indikator Kinerja Keuangan Daerah	18
2.1.6 Tujuan Dan Manfaat pengukuran Kinerja	20
2.1.7 Pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Daerah	21
2.2 Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Metode pengumpulan Data	26

3.4 Jenis dan sumber Data.....	27
3.5 Metode Analisis	27
3.6 Definisi Operasional.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran umum tempat penelitian	31
4.1.1 Sejarah singkat Bappelitbangda Kabupaten Mamasa	31
4.1.2 Landasan operasional Bappelitbangda kabupaten Mamasa.....	37
4.1.3 Lokasi kantor Bappelitbangda kabupaten Mamasa.....	39
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	40
4.1.5 Struktur Organisasi.....	45
4.2 Ringkasan Laporan Keuangan	48
4.3 Hasil Penelitian	52
4.4 Pembahasan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran	6
Tabel 4.1 komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan golongan.....	37
Tabel 4.2 komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan pendidikan.....	37
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	48
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	49
Tabel 4.5.Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	50
Tabel 4.6 Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah	53
Tabel 4.7 Analisis Belanja Langsung	54
Tabel 4.8 Analisis Belanja Tidak Langsung	56
Tabel 4.9 Analisis Belanja langsung dan Tidak Langsung	57
Tabel 4.10 Analisis Pertumbuhan Belanja	60
Tabel 4.11 Analisis Efektivitas Belanja	62
Tabel 4.12 Analisis Efisiensi Belanja	65
Tabel 4.13 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi.....	46



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah, yang artinya pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya masing-masing namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan kaidah Undang-undang.

Mardiasmo (2002:46) *“mengatakan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah secara berkala”*. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang selalu dituntut agar lebih baik bila dibandingkan sebelum otonomi daerah itu dilaksanakan. Aspek pertama adalah daerah selalu diberikan kewenangan yang adil

dalam mengurus pembiayaan daerah dengan syarat utama adanya kemampuan sendiri dari Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan aspek kedua adalah daerah harus mengatur sendiri manajemennya sehingga mampu mencerminkan kedewasaan dalam mengelola keuangan (Agustina, 2013)

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual yang dicapai. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran.

Baridwan (2004 : 27) menegaskan bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implemenrasi maupun pertanggungjawaban. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam manajemen pemerintah.

Analisis terhadap laporan keuangan memerlukan suatu ukuran dan cara dimana dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi suatu lembaga. Suatu lembaga dapat menganalisis laporan keuangan

dengan membandingkan rasio-rasio keuangannya selama beberapa tahun untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja suatu lembaga atau organisasi dari tahun ke tahun apakah terdapat perkembangan yang baik atau buruk dalam kemajuan daerah.

Penilaian kinerja keuangan tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi pada profit saja, namun juga pada lembaga atau non komersial. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintahan menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Penilaian pengelolaan keuangan merupakan sebuah pengukuran tersendiri terhadap kinerja keuangan yang sangat penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang diimplementasikan (Chow, 1998).

Analisis keuangan daerah adalah salah satu indikator yang sangat berpengaruh besar untuk mengetahui tingkat pencapaian, perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Salah satu faktor tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Menurut Tjokroamidjojo (1993) pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi dengan baik, bila sumber-sumber keuangan yang cukup memadai untuk melaksanakan fungsi tersebut. Semakin besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu : memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu

mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunitas kelembagaan. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola Dana APBD secara transparan, efisien dan efektif dan akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) . Bappelitbangda adalah lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui sekretariat daerah.

Mamasa adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, ibu kota Kabupaten Mamasa terletak di kota Mamasa yang berjarak kurang lebih 340 Km dari kota Makassar. Kabupaten Mamasa adalah hasil pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa (POLMAS), berdasarkan UU No. 11 Tahun 2002 bersamaan dengan 22 kabupaten dan kota lainnya di era reformasi Indonesia pada Tahun 2002. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi tentang kondisi geografis dan demografi serta indikator pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggraan pemerintah yang dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah.

Analisis terhadap keuangan daerah pada kantor Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten Mamasa merupakan hal yang penting untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dan suatu penilaian apakah kantor Bappelitbangda telah mengelolah keuangan dengan baik, serta memberikan dampak yang bermanfaat terhadap pembangunan daerah khususnya kesejahteraan masyarakat.

Kantor Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. Tugas Bappelitbangda adalah membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasayarakatan, penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, hingga perancangan anggaran pembangunan.

Dalam pengukuran kinerja keuangan pada Bappelitbangda lebih terfokuskan kepada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappelitbangda dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan analisis rasio pada pemerintahan tidak lah sama dengan perhitungan analisis rasio perusahaan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi,2005). Salah satu tujuan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan atau penurunan,. Atau apakah pemerintahan daerah sudah menjalankan tugasnya dengan baik tau tidak. Kantor Bappelitbangda salah satu instansi pemerintah melihat bentuk penggunaan

pengelolaan keuangan dapat dikatakan belum stabil. Hal ini disampaikan langsung pegawai kantor Bappelitbangda Kabupaten Mamasa bahwa adanya penurunan pagu anggaran setiap tahun sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Kantor Bappelitbangda dan juga kurangnya sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Tupoksi Aparatur dalam bidang perencanaan.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran
Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2020

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2018	6.510.607.385,00	6.465.452.294,00
2019	6.389.177.211,00	6.374.673.673,00
2020	4.739.113.288,00	4.672.208.090,00

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Pengukuran kinerja sangat penting bukan hanya sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah di terapkan secara efisien dan efektif (Mardiasmo,2002:212). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal . Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BANDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (Bappelitbangda) daerah kabupaten Mamasa periode 2018-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa di tinjau dari rasio Keserasian Belanja, Pertumbuhan belanja, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dalam tahun anggaran 2018-2020

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Kantor Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2018-2020.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai media pembelajaran dan juga menambah wawasan penulis tentang kinerja Bappelitbangda kabupaten Mamasa
2. Sebagai bahan acuan atau referensi bagi pihak yang ingin mengembangkan penelitian ini atau ingin melakukan penelitian serupa
3. Diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan analisis kinerja keuangan Bappelitbangda kabupaten Mamasa, menjadi acuan untuk kinerja Bappelitbangda menjadi lebih baik ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Analisis

Pengertian analisis dalam akuntansi menurut Syahrul (2000;48) adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002;52) kata analisis diartikan sebagai : “Penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. ”Pendapat lain menyebutkan analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisis diadaptasi dari Bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*ἀνάλυσις*” (dibaca *Analisis*). Kata *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi secara umum, pengertian analisis

adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

2.1.2 Keuangan Daerah

Halim (2004) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2005, *“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”*. Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Pengertian keuangan Daerah dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (government expenditure) terhadap barang-barang publik (public goods) dan jasa pelayanan.

Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber- sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, akan perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000: 3) :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (publicoriented). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.

- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan.
- 5) Keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
- 6) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
- 7) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
- 8) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
- 9) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
- 10) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- 11) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap.

12) Penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

2.1.3 Laporan Keuangan pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Laporan keuangan tersebut berisi ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategis dan implementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi masing-masing instansi.

Menurut (Darise, 2008:3) bahwa :

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah., yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang elah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dari hasil (outcome) dari setiap program.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut (Mardiasmo, 2002 : 162) tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship)
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatas Atas Laporan Keuangan
5. Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD yang telah dioeriksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan harus didukung oleh laporan setiap SKPD.

Untuk memenuhi amanat tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkat pengguna anggaran, pengelola perbendaharaan, serta pemerintah pusat/daerah. Selain itu, diatur pula hierarki

kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah sampai tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah.

2.1.4 Analisis Kinerja keuangan Daerah

Pengelolaan pemerintah daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut akan menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan daerah selama periode yang dianalisis

Menurut (Ibnu Syamsi, 1986: 199) bahwa :

“Kinerja keuangan pemerintahan Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan hasil Daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan”.

Kinerja keuangan pemerintah Daerah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan social masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai. Dalam instansi pemerintah pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak

ada “*Net Profit*”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Sucipto (2005) menyatakan bahwa “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran”. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Bastian (2005 :274) Memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan penskemaan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Widodo (Halim,2002:126 hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan

pendapatan daerahnya.

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim, 2012:L-4). Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2010:87). Menurut Mohammad Mahsun (2012:135), analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan, dan menurut Groves, Godsey, dan Shulman (2003) dalam Turley (2014:3) Kondisi keuangan adalah konsep yang luas yang menggambarkan kesehatan keuangan pemerintah daerah.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap Keuangan pemerintah yang menyangkut daa, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu, ataupun usaha mengidentifikasikan ciri- ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengolaan pemerintah daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, dan akuntabel, analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan terhadap Anggaran Belanja. Adapun prosedur dalam menganalisis kinerja

keuangan adalah sebagai berikut :

a. Data laporan

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis instansi yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku.

b. Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

c. Membandingkan atau mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.

2.1.5 Indikator kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Bastian (2006:267) menjelaskan Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi:

a. Indikator Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

b. Indikator Keluaran (*Output*) Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan

langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.

- c. Indikator Hasil (*outcome*). Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.
- d. Indikator Manfaat (*Benefit*). Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
- e. Indikator Dampak (*Impact*). Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

(Mardiasmo 2009:128) peran indikator kinerja bagi pemerintah sebagai berikut :

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
- e. Untuk menunjukkan standar kinerja
- f. Untuk menunjukkan efektivitas
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan
- h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk

dilakukan penghematan biaya.

2.1.6 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Moeheriono (2012:72), pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009:65), antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.7 Pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan demikian setiap pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, analisis rasio efektivitas dan efisiensi belanja.

1. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja.

Kriteria penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Ukuran
Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung	Baik
Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung	Tidak Baik

Analisis ini antara lain :

1) Analisis Belanja Langsung

Analisis belanja langsung menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi pemerintah. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

2) Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Analisis belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja tidak langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja dalam APBD. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan

kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\text{pertumbuhan belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea.Belanja } Thn_t - \text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi- potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

3. Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rumus rasio Efektivitas adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rumusan pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

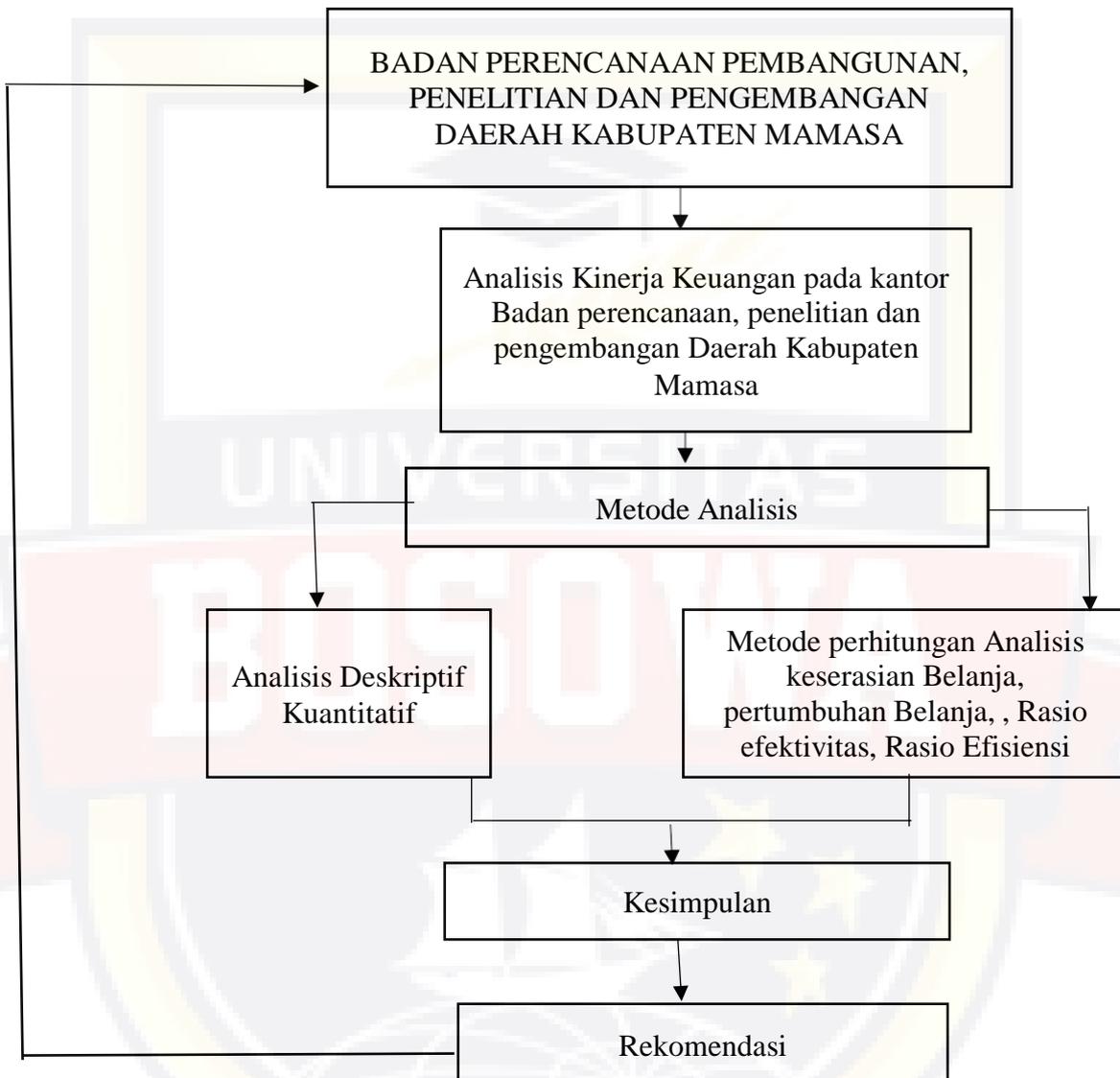
$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah. Secara umum, nilai efisiensi dalam dikategorikan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|------------|
| a. Sangat efisien | : <60% |
| b. Efisien | : 60%-80% |
| c. Cukup Efisien | : 81%-90% |
| d. Kurang efisien | : 91%-100% |
| e. Tidak efisien | : >100% |

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung turun ke lapangan objek penelitian.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. (Russeffendi 2010:33)

Data dalam penelitian ini yaitu data keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 mengenai Realisasi Anggaran belanja daerah.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada kantor Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa. Alamat : Jl. Poros Mamasa-Polewali (Komp. Perumahan Dinas), Dengen, Osango, Kec. Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melalui penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian

teori yang berhubungan dengan penelitian ini seperti materi perkuliahan, literature, buku, journal, web dan beberapa sumber lainnya.

2. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kasubag keuangan Bappelitbangda, dokumentasi mengenai catatan-catatan atau dokumen-dokumen dari kantor Bapplitbangda kabupaten Mamasa khususnya data dari tahun 2018-2020

3.4 Jenis dan sumber data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka atau dapat dihitung, dalam hal ini data yang digunakan adalah data yang berasal dari buku dan lampiran Laporan pertanggungjawaban (LKPJ) kantor Bappelitbangda kabupaten Mamasa periode tahun 2018-2020
2. Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi tidak dapat dihitung, berupa perkembangan perubahan aturan-aturan tentang sistem keuangan, ststruktur organisasi, dokumen-dokumen-dokumen yang ada pada kantor Bappelitbangda Kabupaten Mamasa.

3.5 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) khususnya analisis realisasi anggaran belanja. Analisis deskriptif yaitu untuk menyusun, mengkasifikasi, menafsirkan dan menyimpulkan data sehingga memberikan gambaran mengenai masalah yang dihadapi atau diteliti.

Adapun untuk mengetahui analisis kinerja anggaran belanja daerah dapat

dihitung dengan menggunakan analisis Rasio sebagai berikut :

1. Keceragaman Belanja

Merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Adapun kriterianya sebagai berikut :

Kriteria Penilaian Kinerja Keceragaman Belanja

Kriteria Keceragaman Belanja	Ukuran
Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung	Baik
Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung	Tidak Baik

2. Analisis pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

$$\text{pertumbuhan belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea. Belanja } Thn_t - \text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

3. Analisis rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Analisis rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3.6 Definisi Operasional

1. Analisis adalah aktivitas pemerincian suatu pokok menjadi beberapa bagian dan dikaji setiap bagiannya. Selanjutnya, dicari hubungan antar bagian tersebut dan membuat penafsiran yang tepat agar pokok yang dimaksud dapat didefinisikan dan dipahami secara benar.
2. Pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
4. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan.
5. Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan

stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

6. Analisis pertumbuhan Belanja untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

8. Efisiensi yaitu suatu proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Tempat penelitian

4.1.1 Sejarah singkat Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Melalui kantor ini, Bappelitbangda pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan pada wilayah dan daerah kerjanya. Tugas Bappelitbangda adalah membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasayarakatan, penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, hingga perancangan anggaran pembangunan. Terkait tugas dan fungsi tersebut, maka Bappelitbangda juga memiliki peran wewenang persuratan dan perizinan pembangunan perumahan dan pertokoan bagi developer, salah satu surat tersebut adalah Izin Prinsip untuk perizinan membangun bangunan baik rumah dan property lain dan surat Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Kantor Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamasa

a) Visi Bappelitbangda Kabupaten Mamasa adalah :

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus

diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang Maju, Aman dan Sejahtera Dalam Kehidupan Yang Harmonis Serta Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Adat-istiadat.”

Penjelasan dari Visi tersebut adalah :

Maju : Terwujudnya kemandirian daerah yang ditandai dengan tersedianya infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi dan pemerintah yang berdaya saing

Aman : adanya jaminan kepastian bagi masyarakat dalam melakukan segala aktifitas, masyarakat dalam kondisi aman, tertib dan tenteram.

Sejahtera : kondisi masyarakat Mamasa dalam keadaan sehat, mendapat pendidikan yang layak dan mendapat jaminan sosial.

Harmonis : keadaan dimana setiap orang dapat saling merangkul sejiwa sekata dalam setiap masalah sehingga terjadi keselarasan, keserasian dan kedamaian guna mencapai kebahagiaan bersama sebagaimana falsafah budaya Mamasa ***“mesakada dipotuo pantan kada dipomate”***

Landasan nilai-nilai agama dan adat istiadat : terwujudnya nilai-nilai agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan warisan budaya serta adat istiadat melandasi cita-cita kemajuan, suasana aman, sejahtera dan harmonis dalam hidup bermasyarakat.

b. Misi

Misi merupakan rumusuan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1) Misi 1, “meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi serta air bersih yang mendukung pengembangan ekonomi daerah dan aktivitas sosial kemasyarakatan”. Misi pertama menitikberatkan pada program strategis dalam rangka :

- a. Peningkatan kualitas jalan kabupaten
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan desa/jalan tani;
- c. Peningkatan layanan listrik bagi masyarakat
- d. Peningkatan layanan informasi dan telekomunikasi
- e. Peningkatan layanan air bersih
- f. Memastikan kualitas layanan transportasi masyarakat yang lebih baik (murah,bersih, aman serta ramah lingkungan);
- g. Peningkatan mitigasi bencana alam

2) Misi 2 “meningkatkan kemampuan dan daya tahan ekonomis masyarakat melalui penguatan sektor unggulan yang memperluas lapangan kerja.”

Misi kedua menitikberatkan pada program strategis dalam rangka :

- a. Menjadikan Mamasa sebagai ruam rumah dalam berbagai kegiatan yang berskala provinsi da nasional guna mendorong perrumbuhan ekonomi di Mamasa dan publikasi wisata dan potensi Mamasa
- b. Menjadikan Mamasa sebagai primadona wisata dengan mengembangkan kemitraan dalam promosi dan pengembangan pariwisata;
- c. Pemberian bantuan usaha ntuk peningkatan lapangan kerja dengan pemberdayaan UMKN dan operasi
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
- e. Pemberian bantuanusaha dan pendampingan untuk mewujudkan Mamasa sebagai sentra pertanian, peternakan dan perkebunan yang unggul di Sulawesi Barat
- f. Pengendalian obat pertanian dan pupuk bagi petani
- g. Pembukaan lahan pertanian untuk kemandirian masyarakat
- h. Layanan informasi perkembangan harga produksi pertanian

3). Misi 3 “meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas”.

Misi ketiga menitikberatkan pada program strategis dalam rangka :

- a. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan tenaga kesehatan
- b. Peningkatan layanan kesehatan dengan kapstian layanan kesehatan gratis
kesejahteraan tenaga kesehatan

- c. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
 - e. Peningkatan layanan kesehatan lingkungan dengan mewujudkan Mamasa sebagai kota sehat dan bebas sampah
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - g. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan guru
 - h. Peningkatan kesejahteraan guru dan petugas sekolah
 - i. Pemberian beasiswa bagi putra-pitri Mamasa yang berprestasi dengan keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang sarjana
 - j. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi ternama dalam pembinaan pendidikan
- 4). Misi 4 “ meningkatkan kualitas Management pemerintah dan citra pelayanan terbaik yang berbasis eGovernment dan inovasi pada semua bidang Layanan pemerintah”

Misi keempat menitikberatkan pada program strategis dalam rangka:

- a. Mewujudkan Road Map Reformasi Birokrasi yang jelas dan sistimatis pada semua OPD
- b. Peningkatan pelayanan public dengan perwujudan Satu Inovasi utama pada semua OPD sebagai citra pelayanan birokrasi
- c. Jaminan peningkatan kompetensi aparat pemerintah daerah sesuai amanat perundang-undangan dengan minimal 21 jam pembelajaran dalam satu tahun

- d. Peningkatan kemitraan dengan lembaga pemerintah terkait dan perguruan tinggi ternama dalam peningkatan manajemen dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah
- e. Peningkatan pemberian beasiswa bagi ASN/PNS yang berprestasi
- f. Penerapan prinsip Merit sistem dalam Manajemen ASN di kabupaten Mamasa
- g. Peningkatan kapasitas manajemen dan aparat pemerintah desa
- h. Pelibatan masyarakat (stakeholder) pada semua tahapan manajemen kegiatan pemerintah, mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.
- i. Penguatan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai jaminan perwujudan sistem perencanaan pembangunan yang menjamin integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional

5) Misi 5 “ mewujudkan stabilitas sosial dan politik yang sangat kondusif dalam bingkai kearifan lokal”.

Misi kelima menitikberatkan pada program strategis dalam rangka:

- a. Peningkatan peran pemuda dalam berbagai sektor
- b. Peningkatan lomba olahraga dan bantuan sarana dan prasarana olah raga
- c. Pemberdayaan lembaga politik
- d. Pembentukan dan pembinaan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan
- e. Pembentukan forum warga dan pemerintah yang berbasis desa,
- f. Pemberian bantuan rumah-rumah ibadah
- g. Pemberian bantuan dan santunan bagi masyarakat miskin dan korban bencana

Berikut ini merupakan data komposisi pegawai Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa berdasarkan golongan dan berdasarkan pendidikannya :

Tabel 4.1

Komposisi pegawai BAPPELITBANGDA berdasarkan golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
1	Golongan IV	3 Orang
2	Golongan III	29 Orang
3	Golongan II	18 Orang
4	Golongan I	0 Orang
5	Tenaga kontrak/PTT	0 Orang

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Mamasa

Tabel 4.2

Komposisi pegawai berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	6
2	S1	22
3	D3	2
4	D2	0
5	SLTA	20
6	SLTP	0

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

4.1.2 Landasan operasional kantor Bappelitbangda kabupaten Mamasa

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161)

4.1.3 Lokasi kantor Bappelitbangda kabupaten Mamasa

Berikut ini merupakan data informasi mengenai kantor instansi pemerintah tempat melakukan Penelitian :

- 1) Nama instansi : Badan perencanaan pembangunan, pendidikan dan pengembangan daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Mamasa
- 2) Alamat : Jl. Poros Mamasa-Polewali (Komp. Perumahan Dinas), Dengen, Osango, Kec. Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia
- 3) No. telp : 085242998911
- 4) Website : <http://www.bappelitbangda.mamasakab.go.id/>

- 5) Bagian Tempat penelitian : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten

Mamasa

4.1.4 Tugas pokok dan fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa. Kepala BAPPELITBANGDA dijabat oleh Ir. Mambu, MT

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup kesekretariat yang meliputi pengolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariat
- 2) Pengkoordinasikan penyusunan perencanaan program badan
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan badan
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas badan
- 6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang kesekretariat

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan terdiri dari:

- a) Sub Bagian Perencanaan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan daerah

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, pada fungsi perencanaan, pengkoordinasian, analisis dan administrasi meliputi pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah dan tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Bidang perencanaan dan pembangunan daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah

Bidang Perencanaan Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan pada fungsi perencanaan pengendalian, pengkoordinasian, analisis dan administrasi dengan tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perumahan dan lingkungan hidup, tata ruang dan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan sanitasi

Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah meliputi Sarana dan prasarana, Perumahan dan Tata Ruang, serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan pembangunan Bidang Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah meliputi Sarana dan prasarana, Perumahan dan Tata Ruang, serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah meliputi Sarana dan prasarana, Perumahan dan Tata Ruang, serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. Mengolah dan menganalisa program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan Bidang Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah meliputi Sarana dan prasarana, Perumahan dan Tata Ruang, serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- e. Memonitoring pelaksanaan program pembangunan Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah meliputi Sarana dan prasarana, Perumahan dan Tata Ruang, serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - f. Berkewajiban memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan jika diperlukan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan pada fungsi perencanaan pengendalian, pengkoordinasian, analisis dan administrasi dengan tugas pokok memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang meliputi perekonomian dan investasi, Kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Rincian Tugas Bidang Ekonomi Sosial Budaya adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi sosial budaya;
- b. Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Ekonomi dan sosial budaya;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi dan sosial budaya;

- d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi dan sosial budaya;
- e. Membina dan melaksanakan penilaian prestasi kerja Kepala Sub Bidang dalam rangka pengembangan karier;
- f. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan;
- g. Berkewajiban memberikan saran kepada kepala badan jika diperlukan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan pada fungsi perencanaan pengendalian, pengkoordinasian, analisis dan administrasi, dan tugas pokok memimpin, membina, mengelola, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dan data statistik

Rincian tugas Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan Statistik;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

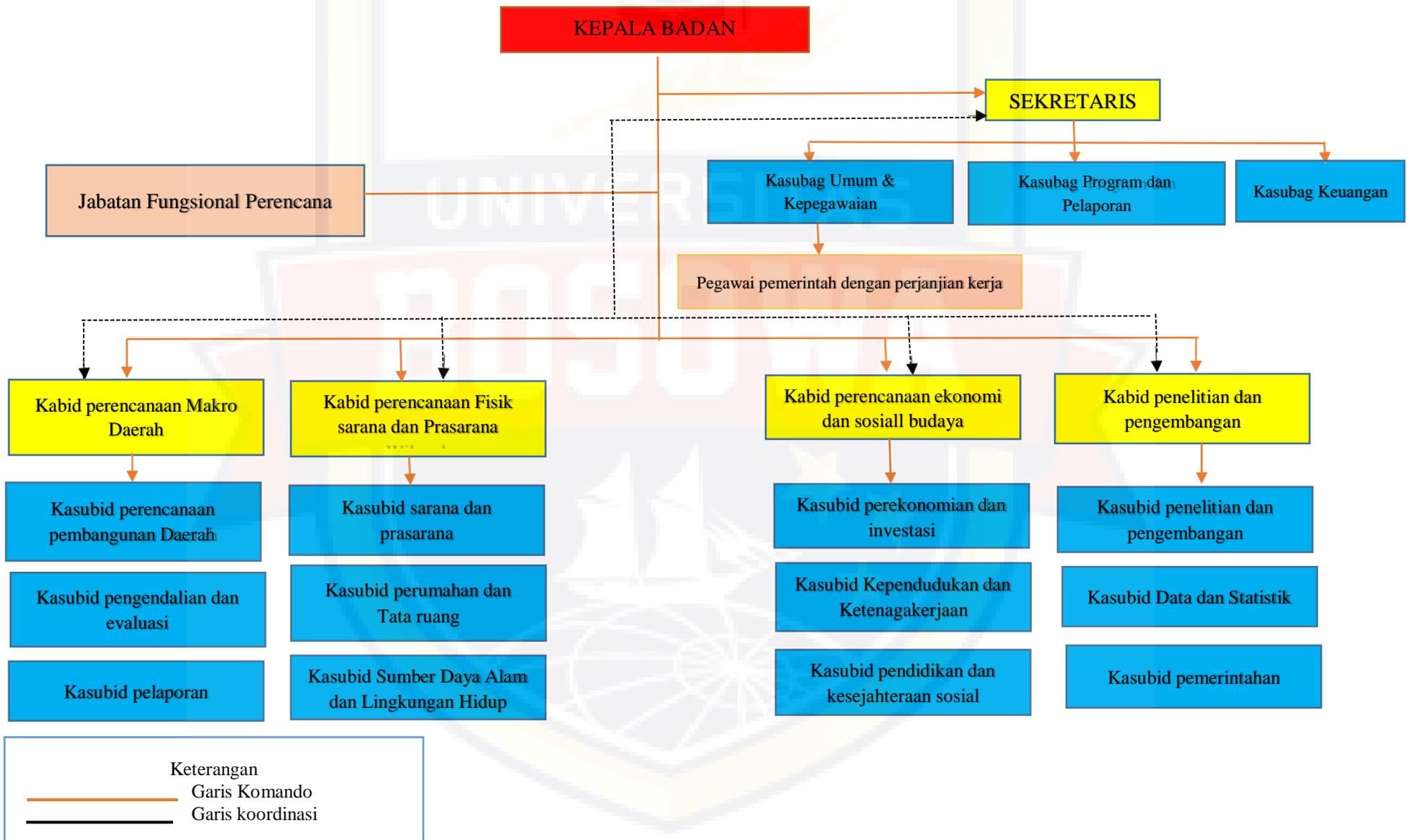
- c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- d. Membina dan melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- e. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau organisasi profesi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.5 Struktur organisasi

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua UU Nomor 23/24 tentang pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten Mamasa melakukan perubahan Organisasi perangkat Daerah (OPD). Berikut struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Mamasa :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Mamasa



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Mamasa 2021



Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamasa terdiri dari :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat;
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Program dan Pelaporan;
- c) Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah :
 - 1) Subbidangbidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - 3) Subbidang Pelaporan;
- d) Bidang Perencanaan Fisik Sarana Dan Prasarana Wilayah
 - 1) Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Subbidang Perumahan dan Tata Ruang
 - 3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e) Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya:
 - a) Subbidang Perekonomian dan Investasi;
 - b) Subbidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 - c) Subbidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
- f) Bidang Penelitian Dan Pengembangan
 - 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Subbidang Data dan Statistik
 - 3) Subbidang Pemerintahan

4.2 Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Mamasa memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018
BELANJA	6.510.607.385,00	6.465.452.294,00
BELANJA OPERASI	6.470.978.385,00	6.426.020.794,00
Belanja pegawai	2.949.916.385,00	2.929.218.294,00
Belanja Barang dan Jasa	3.521.062.000,00	3.496.802.500,00
BELANJA MODAL	39.629.000,00	39.431.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.629.000,00	39.431.500,00
SURPLUS / DEFISIT	(6.510.607.385,00)	(6.465.452.294,00)
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	(6.510.607.385,00)	(6.465.452.294,00)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019
BELANJA	6.389.177.211,00	6.374.673.673,00
BELANJA OPERASI	6.339.177.211,00	6.324.923.673,00
Belanja pegawai	3.084.369.711,00	3.073.458.173,00
Belanja Barang dan Jasa	3.254.807.500,00	3.251.465.500,00
BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.750.000,0
SURPLUS/DEFISIT	(6.389.177.211,00)	(6.374.673.673,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.389.177.211,00)	(6.374.673.673,00)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran 2020
Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020
BELANJA	4.739.113.288,00	4.672.208.090,00
BELANJA OPERASI	4.394.183.288,00	4.327.458.090,00
Belanja pegawai	2.850.743.256,00	2.794.071.390,00
Belanja Barang dan Jasa	1.543.440.032,00	1.533.386.700,00
BELANJA MODAL	344.930.000,00	344.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.930.000,00	344.750.000,00
SURPLUS/DEFISIT	(4.739.113.288,00)	(4.672.208.090,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.739.113.288,00)	(4.672.208.090,00)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Mamasa (Bappelitbangda kabupaten Mamasa) mengalami perubahan dari tahun ke tahun atau pasang surut tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 6.510.607.385,00 dengan realisasi Rp 6.465.452.294,00. Dari tabel diatas anggaran dan realisasi anggaran berbeda setiap tahunnya. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional terjadi peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 6.470.978.385,00 dan untuk belanja modal jumlah anggarannya meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 344.930.000,00.

Jumlah anggaran pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 6.510.607.385,00, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 6.465.452.294,00 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 6.389.177.211,00 dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 6.374.673.673,00 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal

Jumlah anggaran pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 4.739.113.288,00 dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 4.672.208.090,00 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

4.3 Hasil Penelitian

1. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka dianggap tidak baik. Jika belanja pegawai >50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak baik. Demikian pula sebaliknya.

Keserasian belanja diklasifikasikan menjadi dua yaitu : belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal. sementara Belanja Tidak Langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

a) Analisis Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Menginformasikan mengenai posisi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut :

1. Baik : Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung

2. Tidak Baik : Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung

Rumus pengukuran Kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja langsung}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.6
Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah
Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2018	6.510.607.385	6.465.452.294	2.929.218.294	3.536.234.000
2019	6.389.177.211	6.374.673.673	3.073.458.173	3.301.215.500
2020	4.739.113.288	4.672.208.090	2.794.071.390	1.878.136.700

Sumber : Data Hasil Olahan

Dengan rumus analisis Keserasian Belanja dengan berdasarkan Tabel 4.6 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja langsung}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

a. Tahun 2018

Persentase rasio Belanja Langsung Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{3.536.234.000}{6.465.452.294} \times 100\%$$

$$= 55 \%$$

a. Tahun 2019

Persentase rasio Belanja Langsung Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{3.301.215.500}{6.374.673.673} \times 100\%$$

$$= 52 \%$$

c. Tahun 2020

Persentase rasio Belanja Langsung Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{1.878.136.700}{4.672.208.090} \times 100\%$$

$$= 40 \%$$

Tabel 4.7

Analisis Belanja Langsung

Tahun anggaran 2018-2020

Tahun anggaran	Total Belanja Langsung	Realisasi Belanja	Rasio %
2018	3.536.234.000	6.465.452.294	55%
2019	3.301.215.500	6.374.673.673	52%
2020	1.878.136.700	4.672.208.090	40%
Rata-rata	8.715.586.200	17.512.334.057	49%

Sumber : Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Analisis Keserasian Belanja jika dilihat dari Belanja Langsung mengalami perubahan setiap tahunnya. Kenaikan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja terjadi pada tahun 2018 dengan mencapai tingkat

persentase tinggi yaitu 55% dari total anggaran Rp. 6.465.452.294 , sedangkan penurunan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat persentase 40% dari total anggaran Rp. 4.672.208.090 . Di tahun 2019 Analisis Belanja Langsung menunjukkan pada angka persentase 52% dari total anggaran Rp. 6.374.673.673. Total Keseluruhan Belanja Langsung adalah 49%.

b.) Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja.

Rumusny adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak langsung}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Dengan rumus Rasio Belanja Tidak Langsung maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Tahun 2018

Persentase rasio Belanja Tidak Langsung Bappelitbangda Kabupaten

Mamas Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{2.929.218.294}{6.465.452.294} \times 100\%$$

$$= 45 \%$$

b. Tahun 2019

Persentase rasio Belanja Tidak Langsung Bappelitbangda Kabupaten

Mamas Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{3.073.458.173}{6.374.673.673} \times 100\%$$

$$= 48 \%$$

c. Tahun 2020

Persentase rasio Belanja Tidak Langsung Bappelitbangda Kabupaten

Mamasa Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{2.794.071.390}{4.672.208.090} \times 100\%$$

$$= 60 \%$$

Tabel 4.8

Analisis Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja	Rasio(%)
2018	2.929.218.294	6.465.452.294	45%
2019	3.073.458.173	6.374.673.673	48%
2020	2.794.071.390	4.672.208.090	60%
Rata-rata	8.796.747.857	17.512.334.057	51%

Sumber : Data Hasil Olahan

Dapat dilihat dari tabel di atas struktur total belanja tidak langsung tidak begitu banyak mengalami perubahan dan kenaikan. Perubahan rasio terlihat tidak begitu jauh. Kenaikan yang ada pada Belanja Tidak Langsung Terhadap Total

Belanja pertahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak tetap, selalu ada perubahan pertahunnya.

Pada tahun 2018 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung berada pada persentase 45% dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 6.465.452.294

Pada tahun 2019 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung mengalami kenaikan, yaitu sekitar 48% dengan total realisasi belanja Rp. 6.374.673.673

Pada tahun 2020 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung mengalami kenaikan sekitar 60% dengan total realisasi belanja Rp. 4.672.208.090.

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa total belanja daerah dalam tiga tahun anggaran mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sekitar 60%, dan penurunan terjadi pada tahun 2018 sekitar 45%. Dan total realisasi belanja seluruhnya yaitu sekitar 51% atau sebesar Rp. 17.512.334.057.

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 penggunaan anggaran terfokus pada belanja tidak langsung, yang mana belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Di tahun 2018 pengguna pada alokasi pembiayaan belanja langsung sebesar 55% atau sekitar Rp. 3.536.234.000, dengan total persentase untuk belanja tidak langsung sebesar 45% atau sekitar Rp. 2.929.218.294 dari total anggaran belanja

dalam APBD. Pada tahun ini keserasiannya dikatakan baik, karena persentase Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung

Di tahun 2019 pengguna pada alokasi pembiayaan Belanja Langsung sebesar 52% atau sekitar Rp. 3.301.215.500, dengan total Belanja Tidak Langsung sebesar 48% atau sekitar Rp. 3.073.458.173. Pada tahun ini keserasian dikatakan baik, karena persentase belanja langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

Di tahun 2020 pengguna pada alokasi pembiayaan Belanja langsung mengalami penurunan menjadi 40% atau sekitar Rp. 1.878.136.700 dengan total belanja tidak langsung sebesar 60% atau sekitar Rp. 2.794.071.390. pada tahun ini keserasian dikatakan tidak baik, karena persentase Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung.

Tabel 4.9

Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Belanja Langsung (%)	Belanja Tidak Langsung (%)	Total (%)
2018	55%	45%	100%
2019	52%	48%	100%
2020	40%	60%	100%
Rata-rata	49%	51%	100%

Sumber : Data Hasil Olahan

2. Analisis pertumbuhan Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Kriteria pertumbuhan belanja adalah sebagai berikut :

- a. Naik : Positif
- b. Turun : Negatif

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{pertumbuhan belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea. Belanja } Thn_t - \text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja dengan berikut ini :

- a. Tahun 2018-2019

Persentase rasio Pertumbuhan Belanja Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2019 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{6.374.673.673 - 6.465.452.294}{6.465.452.294} \times 100\%$$

$$= (1) \%$$

- b. Tahun 2019-2020

Persentase rasio Pertumbuhan Belanja Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2019-2020 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{4.672.208.090 - 6.374.673.673}{4.672.208.090} \times 100\%$$

$$= (3) \%$$

Tabel 4.10
Analisis Pertumbuhan Belanja
Tahun Anggaran 2018-2020

Uraian	2018-2019	2019-2020	Total
Realisasi Belanja Tahun t-1	6.465.452.294	6.374.673.673	12.840.125.967
Realisasi Belanja Tahun t	6.374.673.673	4.672.208.090	11.046.881.763
Kenaikan/Penurunan	(90.778.621)	(1.702.465.583)	(1.793.244.204)
%	(1%)	(3%)	(1%)

Sumber : Data hasil olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran Belanja mengalami penurunan dan bernilai negatif karena pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebesar Rp. 90.778.621 dengan persentase negatif sebesar 1% dari Pagu Anggaran yang tersedia pada realisasi belanja di tahun 2018 dan 2019.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kembali mengalami penurunan dan bernilai negatif yaitu sebesar 3% dan pada tahun ini juga terjadi pengurangan pertumbuhan belanja sebesar Rp. 1.702.465.583

Dapat dikatakan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Mamasa selama tiga tahun anggaran mengalami penurunan atau bernilai negatif terhadap pertumbuhan

Belanja, dapat dilihat dari pengurangan jumlah anggaran. Jika dilihat dari total keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.793.244.204 dengan persentase 1%.

3. Rasio efektivitas Belanja

Rasio efektivitas digunakan untuk membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, kriteria efektivitas belanja sebagai berikut :

- a. Sangat efektif : lebih dari 100%
- b. Efektif : 90-100%
- c. Cukup efektif : 80-90%
- d. Kurang efektif : 60-80%
- e. Tidak efektif : dibawah 60%

Rumus pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efektivitas, Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Tahun 2018

Persentase Rasio Efektivitas Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{6.465.452.294}{6.510.607.385} \times 100\%$$

$$= 99 \%$$

b. Tahun 2019

Persentase Rasio Efektivitas Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun

2019 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{6.374.673.673}{6.389.177.211} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

c. Tahun 2020

Persentase Rasio Efektivitas Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun

2020 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{4.672.208.090}{4.739.113.288} \times 100\%$$

$$= 98 \%$$

Tabel 4.11

Rasio Efektivitas Belanja

Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas
2018	6.510.607.385	6.465.452.294	99%
2019	6.389.177.211	6.374.673.673	100%
2020	4.739.113.288	4.672.208.090	98%
Rata-rata	17.638.897.884	17.512.334.057	99%

Sumber : Data hasil olahan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2018-2020 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dapat dikatakan efektif. Yang artinya tidak terdapat kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan, terutama dalam penganggaran perwujudan dari realisasi anggaran itu sendiri.

Di tahun 2018 tingkat efektivitas dari anggaran belanja berada pada persentase 99% yang menunjukkan angka kisaran Rp. 6.465.452.294, pada tahun ini anggaran dapat dikatakan efektif.

Di tahun 2019 mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 100% yang menunjukkan angka kisaran Rp. 6.374.673.673, pada tahun ini dapat dikatakan sangat efektif.

Di tahun 2020 penggunaan anggaran belanja sekitar 98% dengan kisaran Rp. 4.672.208.090, penurunan terjadi pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 2%, meskipun begitu pengguna anggaran di tahun ini dikatakan efektif.

Efektivitas yang ditunjukkan berdasarkan perhitungan dan kriteria yang ditetapkan memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam periode tahun ke tahun. Pada tiga tahun anggaran ini, penggunaan anggaran dikategorikan efektif dengan persentase 99%, artinya adalah realisasi anggaran yang ditetapkan sudah terpenuhi dari target yang ditetapkan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di instansi sudah maksimal dalam hal pelaksanaannya.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Mardiasmo (2009:132) efisiensi hubungan erat dengan konsep produktifitas, Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). penggunaan sumber daya dan sana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Rasio efisien digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja dan juga untuk melihat tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : kurang dari 60%
- b. Efisien : 60%-80%
- c. Cukup efisien : 81%-90%
- d. Kurang efisien : 91%-100%
- e. Tidak efisien : lebih dari 100%

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efisiensi, Maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tahun 2018

Persentase Rasio Efisiensi Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{3.536.234.000}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

6.510.607.385

= 54 %

b. Tahun 2019

Persentase Rasio Efisiensi Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2019

yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{3.301.215.500}{6.389.177.211} \times 100\%$$

= 52 %

c. Tahun 2020

Persentase Rasio Efisiensi Bappelitbangda Kabupaten Mamasa Tahun 2020

yaitu sebagai berikut :

$$= \frac{1.878.136.700}{4.739.113.288} \times 100\%$$

= 40 %

Tabel 4.12

**Rasio Efisiensi Belanja
Tahun anggaran 2018-2020**

Tahun	Anggaran	Belanja Langsung	Rasio Efisiensi
2018	6.510.607.385	3.536.234.000	54%
2019	6.389.177.211	3.301.215.500	52%
2020	4.739.113.288	1.878.136.700	40%
Rata-rata	17.638.897.884	8.715.586.200	49%

Sumber : Data hasil olahan

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk

atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 54% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 3.536.234.000. dari total anggaran yang ada dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2018 sangat efisien.

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 52% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp. 3.301.215.500, pada tahun ini terjadi penurunan sekitar 2%, hal ini lebih baik dari tahun sebelumnya dalam hal penghematan anggaran. Pada tahun ini penggunaan anggaran dapat dikatakan sangat efisien

Pada tahun 2020 tingkat efisien pengguna anggaran berada pada persentase 40% dengan penggunaan anggaran Rp. 1.878.136.700. pada tahun ini terjadi penurunan sekitar 14% lebih banyak dari tahun sebelumnya, diikuti dengan penurunan anggaran. Hal ini jauh lebih baik dalam hal penghematan anggaran yang dilakukan instansi pada tahun 2020 dan dapat dikatakan sangar efisien.

Dari tabel perhitungan di atas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Bappelitbangda Kabupaten Mamasa tidak ditemukan adanya angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2018-2020 semua angka rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk tiga tahun anggaran. Dengan demikian Bappelitbangda Kabupaten Mamasa telah berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui program-program yang ada dan telah dijalankan.

4.4 Pembahasan

Ringkasan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13

Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa

No.	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian			Rata-rata
		2018	2019	2020	
1.	Analisis Keceragaman Belanja :				
	a. Belanja Langsung	55%	52%	40%	49%
	b. Belanja Tidak Langsung	45%	48%	60%	51%
2.	Analisis Pertumbuhan Belanja		(1%)	(3%)	(1%)
3.	Analisis Efektivitas Belanja	99%	100%	98%	99%
4.	Analisis Efisiensi Belanja	54%	52%	40%	49%

Sumber : Data hasil olahan, 2021

1. Keceragaman Belanja

Analisis Keceragaman Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selama tahun 2018-2020 total keseluruhan belanja langsung sebesar 49% sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar 51%. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dilihat dari analisis keceragaman belanjanya lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk biaya belanja tidak langsung.

Analisis keserasian belanja pada Bappelitbangda Kabupaten Mamasa pada tahun anggaran 2018 dan tahun 2019 mengalami dampak yang baik, dikarenakan penggunaan anggarannya terfokus pada Belanja langsung. Sementara pada anggaran tahun 2020 mengalami dampak yang tidak baik, hal ini dikarenakan penggunaan anggarannya lebih terfokus pada Belanja Tidak Langsung. Namun jika dilihat dari total keseluruhannya Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dikatakan tidak baik dalam penggunaan anggaran dalam tiga tahun khususnya terhadap keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dampaknya jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah yang berakibat berkurangnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat ataupun terhadap program kegiatan instansi. Dan kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastuktur yang memerlukan pembiayaan yang relatif besar. Kenaikan belanja tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah karena lebih memfokuskan kepada penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

Solusi dalam mengatasi dampak tersebut adalah perluhnya dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung guna dialokasikannya untuk keperluan belanja langsung. Serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Kenaikan belanja daerah perlu di lihat dari penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan sebagainya. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Pada perhitungan analisis pertumbuhan belanja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan dapat dilihat dari segi angka persentase. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dan bernilai negatif sebesar (1%) dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.778.621. dan pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan belanja juga bernilai negatif sebesar (3%) dengan anggaran sebesar Rp. 1.702.465.583. sedangkan jika dilihat dari total keseluruhan pertumbuhan pada Bappelitbangda Kabupaten Mamasa selama tiga tahun dan juga berdasarkan Analisis pertumbuhan belanja bernilai negatif sebesar (1%) dengan sisa anggaran Rp. 1.793.244.204

3. Analisis Efektivitas Belanja

Dari hasil perhitungan analisis efektivitas Belanja, maka dapat dilihat mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Bappelitbangda Kabupaten Mamasa telah melakukan penggunaan anggaran dengan efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya berada pada kisaran 98-100%. Jika dilihat dari tingkat kriterianya maka pengguna anggaran selama tiga tahun anggaran tersebut sudah dilakukan dengan efektif. Dimana tingkat rasio tertinggi pada tahun 2019 mencapai hingga 100% dan rasio tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 98%, hal ini masih di atas 90% artinya masih efektif.

4. Analisis Efisiensi Belanja

Untuk penilaian analisis efisiensi belanja dapat dikatakan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah sangat efisiensi dalam mengelola setiap penggunaan anggarannya. Karena berdasarkan kriteria dan hasil perhitungan tersebut sudah memantapkan posisinya. Dapat dilihat dari total keseluruhan analisisnya selama tiga tahun yaitu sebesar 49%. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka di atas 60% atau tidak melebihi anggaran belanja. Untuk hal ini Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dapat melakukan penghematan anggaran selama tiga tahun anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa di lihat dari keserasian belanja, terlihat secara keseluruhan dana belanja daerah di alokasikan untuk belanja tidak langsung, sisanya dialokasikan untuk belanja langsung. Pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dikatakan baik dalam penggunaan anggaran karena lebih terfokus pada belanja langsung . Sementara pada tahun 2020 dinilai tidak baik, karena lebih terfokus pada belanja tidak langsung.
2. Kinerja Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa di lihat dari pertumbuhan belanja. Bahwa pada analisis ini pertumbuhan belanja dari tahun 2018-2020 mengalami perubahan. Masing-masing anggaran memiliki tingkat penyerapan anggarannya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan. Penilaian kerja keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa secara umum menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 1% dengan sisa anggaran Rp. (1.793.244.204).
3. Kinerja Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa dilihat dari analisis efektivitas belanja selama tiga tahun dari tahun 2018-2020 sudah efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungan adalah sebesar 99% hal ini masih di atas 90%

4. Kinerja Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa di lihat dari analisis efisiensi belanja, bahwa realisasi anggaran belanja Bappelitbangda tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Mamasa telah melakukan efisiensi belanja. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungan yaitu sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Mamasa telah cukup melakukan penghematan selama tiga tahun. ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka di atas 60%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Bappelitbangda Kabupaten Mamasa adalah :

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan analisis.. kinerja keuangan Bappelitbangda selama tiga tahun periode anggaran maka haruslah memperhatikan suatu kebijakan mengenai realisasi dan anggaran yang digunakan dalam suatu periode

2. Untuk masa yang akan datang lebih memperhatikan sarana, prasarana sumber daya manusia pada kantor Bappelitbangda Kabupaten Mamasa. Dan menempatkan pegawai kantor Bappelitbangda pada posisi sesuai dengan kapasitas kemampuannya.

3. Untuk peneliti berikutnya

Menganalisis kinerja keuangan Bappelitbangda Kabupaten Mamasa diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitiannya agar memberikan hasil yang lebih akurat dan Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim. 2007:330. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Agustina, 2013. *Pengaruh profitabilitas Dan Pengungkapan Corporatesocial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*. (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi.Padang:Universitas Negeri Padang
- Bastian, Indra. (2005:274) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Suatu pengantar, Yogyakarta penerbit : Andi Offset
- Bastian, (2006:267). *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Surabaya
- Baridwan, Zaki, 2004:27, *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: BPFE
- Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, (2016). *Rencana strategis Badan Perencanaan Daerah Kota Mamasa*
- Chow, V. T, Chan, Y. C, Yong, R. et al, (1998). Monitoring of Dengue Viruses in Field Caught Aedes Aegypti and Aedes Albopictus by A Type-Specific PCR and Cycle Squencing, *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*
- Darise, Nurlan. 2008 ; 3. *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Akuntansi Sekor Publik), cetakan pertama, Jakarta, penerbit :PT Indeks
- Dwi Prastowo, Rifka Juliaty. 2002. Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Unit penerbit & percetakan AMP YKPN
- Groves. S. Godsey, dan Shulman. (2003). *Financial Indicator For Local Government*. *Publik Finance International City Management Association*
- Halacmi, Arie.2005, *Performance measurement is only one way of managing performance*. *Internasional Journal of productivity and Performance Management*.
- Ibnu Syamsi. 1986. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

- Moeheriono. 2012. *“pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo 2002:46. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo 2002:212. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo, 2000:3, *Perpajakan Indonesia Revisi 2000*, penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002: 162. *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009:128. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009:132. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi Yogyakarta
- Mahmudi.2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN
- Mahsun, Mohammad, 2012, *pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Russeffendi, E.T. (2010:33). *Dasar-dasar Penelitian pendidikan dan Bidang NonEksakta Lainnya*. Bandung: Tarsito
- Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar, 2000, “kamus istilah-istilah Akuntansi”, cetakan pertama, Citra Harta Prima, Jakarta
- Sucipto.2005. penilaian Kinerja Keuangan. USU digital library. www.google.com. (diakses Maret 2021)
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1993. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung
- Ulum, Ihyaul, 2009. *Intellectual Capital: konsep dan kajian Empiris*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Np.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa



